

Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Pada Desa Permisian

Oleh:

Jazilatul Rohmah

Hendra Sukmana S.AP., M.KP

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2024

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dalam rangka melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa, desa memiliki ruang gerak yang luas untuk mengatur dan mengendalikan sistem pengelolaan secara otonom. Selain itu, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola pemerintahan dan kekayaan alam yang dimilikinya, serta kekayaan dan perekonomian masyarakat, dengan lebih mandiri. Oleh karena itu, tingkat akuntabilitas yang tinggi harus menyertai status desa. Perangkat desa harus mampu mengimplementasikan konsep akuntabilitas dan transparansi,

Sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Administrasi Berbasis Elektronik, (Kementerian Sekretariat Negara, 2018) penyelenggaraannya bersifat pengabdian. Di era digital dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, pemerintahan sudah menjadi kebutuhan bagi bangsa. adanya tata kelola digital khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan desa harus berpegang teguh pada tata kelola yang baik, khususnya akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan keadilan, Pemerintah akan lebih efisien dari sisi biaya, waktu, termasuk digitalisasi dalam pengelolaan keuangan di pemerintah desa, (Rivan & Maksum I, 2019).

Pendahuluan

Model pengelolaan keuangan desa meliputi serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa, desa dituntut untuk mengelola keuangannya dengan sebaik-baiknya. terutama dalam perencanaan APBDes yang harus dipersiapkan oleh pemerintah desa setiap tahunnya dan anggaran yang telah dianggarkan diharapkan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu pemerintahan desa yang menggunakan digitalisasi khususnya di bidang penatausahaan keuangan yaitu Aplikasi Sistem Keuangan Desa adalah Pemerintah Desa Permisan yang terletak di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2017, sistem keuangan desa (SISKEUDES) diluncurkan di seluruh pengelolaan keuangan desa yang harus bekerja secara online atau terkoneksi dengan jaringan. Proses penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang berpedoman pada mekanisme dalam sistem yaitu dilakukan menurut tahapan penarikan anggaran dan realisasi anggaran atau menurut transaksi yang dilakukan oleh desa digunakan untuk melaksanakan keuangan desa. manajemen atau penganggaran. Desa diwajibkan untuk memutuskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAB) yang sebelumnya dibuat secara manual dan diubah untuk dicatat dalam sistem

Permasalahan Yang Ditemui

Tabel 1
Rekapitulasi Perkembangan APBDes Pemerintah Desa Permisan Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan	Belanja	Dana Desa
2021	1.913.227.260.00	2.180.901.850.00	995.795.000.00
2022	2.164.360.338.00	1.984.449.956.00	793.552.000.00
2023	1.799.632.874.00	2.189.025.652.37	784.675.000.00

Sumber : diolah Penulis dari Pemerintah Desa Permisan (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan tahun 2023 mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2023 yang menurun sebesar Rp. 364.727.464.00. sedangkan belanja pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.204.575.669.037. Proses pengelolaan keuangan dalam APBDes tahun 2021-2023 memanfaatkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), maka laporan anggaran berupa pendapatan dan belanja sudah dilaporkan dan dikelola melalui aplikasi SISKEUDES

Metode

Pemerintah Desa Permisan, Kecamatan Jabon, dan Kabupaten Sidoarjo menjadi lokasi penelitian ini.. Memanfaatkan pendekatan kualitatif, pengumpulan data yang meliputi :(1) Data primer merupakan data dari pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi, (2) data sekunder merupakan data dari berbagai/sumber data tidak langsung. Pada penelitian ini, sumber data sekunder dikumpulkan dari sumber data jurnal dan media

Purposive sampling adalah metode yang digunakan dalam pendekatan penentuan informan dan digunakan sebagai sumber informasi tergantung pada sejumlah faktor. Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Masyarakat Desa Permisan menjadi informan penelitian. Teknik analisis data yang akan digunakan antara lain reduksi data, triangulasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Komunikasi

Aspek komunikasi berperan penting dalam pencapaian tujuan, dan juga berdampak pada bagaimana sistem manajemen diterapkan di lembaga. Komunikasi antara atasan dan bawahan sangat penting saat mengelola keuangan.

Selanjutnya komunikasi dalam pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Desa akan terus bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memutuskan dan memutakhirkan APBDes dan komunikasi antar pemangku kepentingan, terutama Kepala Desa, Operator Siskeudes serta Lembaga yang ada di Desa Permisian harus selaras peraturan

jika dikaitkan dengan teori implementasi Edward III, menunjukkan bahwa komunikasi belum berjalan dengan baik. sebagaimana bahwa proses komunikasi menyalurkan informasi kebijakan dari pembuat kebijakan pada pelaksana kebijakan, yang diteruskan pada kelompok tujuan untuk mendapat tanggapan dari pihak-pihak terkait, dibuktikan dalam komunikasi implementasi Sistem Keuangan Desa antara penyelenggara kurangnya bimbingan teknis dan belum jelas dalam penyampaian materi bimtek sehingga operator Sistem Keuangan Desa kurang memahami informasi yang diberikan, tetapi komunikasi dalam pengelolaan keuangan Desa terlaksana dan terjalin sangat baik antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat dalam penetapan APBdes dan pembangunan, Masyarakat juga ikut serta menyalurkan aspirasinya.

Hasil dan Pembahasan

2. Sumber Daya

Indikator sumber daya juga dianggap penting untuk keberhasilan implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sumber daya itu sendiri harus mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa dan memiliki sikap tanggung jawab. Sumber daya manusia yang tidak memadai (baik dari segi jumlah maupun kapasitas) mengakibatkan program tidak berjalan dengan baik dengan pengawasan program yang tidak memadai. Pelaksanaan manajemen organisasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, antara lain sumber daya infrastruktur, keuangan, dan aparatur. efektivitas praktik pengelolaan keuangan.

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memiliki kekurangan seperti sarana prasarana kurang memadai, sumber daya keuangan kurang disediakan dalam implementasi sistem keuangan desa untuk mendukung motivasi kinerja operator. penerapan Sistem Keuangan Desa juga memiliki keterbatasan, antara lain sering terjadi error

jika dikaitkan teori implementasi Edward III dalam hal sumber daya, klaim tersebut di atas belum sepenuhnya terwujud karena secara teori implementasi tidak akan berhasil jika sumber daya yang cukup tidak tersedia untuk melaksanakannya. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia, khususnya kompetensi pelaksana, sumber daya infrastruktur, atau sumber daya keuangan. dalam implementasi pada sistem keuangan desa masih kekurangan sumber daya seperti operator dalam pengoperasian sistem keuangan desa terkadang masih kurang teliti hingga terjadi error atau kendala dan jaringan yang lamban, karena sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan guna memperlancar pekerjaan serta kegiatan yang ada di kantor Pemerintah Desa Permisan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana sangat penting dalam pelaksanaan program, untuk implementasi program yang tepat, pelaksana harus dapat bekerja sama dengan pelaksana program, implementor memiliki tiga sikap mengenai kebijakan : untuk mencapai tujuan program, diperlukan dukungan dari orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Kepala Desa Permisan di Kecamatan Jabon sangat bagus dalam menginspirasi dan mengarahkan. Hubungannya dengan Kepala Badan Keuangan atau operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) seperti anak dan orang tua yang senantiasa mengarahkan, mendorong, sebagai motivasi dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawabnya sesuai petunjuk, walaupun Kepala Desa permisan belum bisa memahami digitalisasi dalam aplikasi Sistem keuangan desa, namun kepala desa tidak khawatir karena yakin bahwa bawahannya atau operator Sistem Keuangan Desa bisa menyesuaikan perkembangan digital di era pengembangan serba digital.

Pernyataan di atas apabila dikaitkan dengan teori implementasi Edward III dalam aspek disposisi sudah sesuai dan berjalan maksimal, sebagaimana dalam Teori disposisi berfokus pada kepribadian dan ciri-ciri pelaksana, seperti kejujuran, sifat demokratis, dan komitmen. Jika pelaksana memiliki pola pikir yang positif, maka proses implementasi kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika eksekutor memiliki sifat dan cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses tersebut tidak akan berhasil. Jelas bahwa pelaksana kebijakan dan masyarakat mendukung implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), karena akan membantu desa mengelola keuangannya dan menumbuhkan komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis yang dikenal sebagai pelaksana

4. Struktur Birokrasi

Karena berkaitan dengan proses, sistem kerja, kewenangan, pembagian kerja, dan koordinasi kelembagaan, maka struktur birokrasi sangat menentukan implementasi kebijakan. Karena faktor struktural birokrasi efektif dalam implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program tidak lepas dari faktor tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan seluruh stakeholder terkait cukup sinergis dalam proses penyelenggaraan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Pemerintahan Desa. Kerangka kelembagaan pelaksana Sistem Keuangan Desa pada Pemerintah Desa Permisan berjalan dengan baik di Kecamatan Permisan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Pernyataan di atas apabila dikaitkan dengan teori implementasi Edward III dalam aspek Struktur birokrasi sudah sesuai atau berjalan maksimal sebagaimana dalam teori struktur birokrasi yang bertanggungjawab atas implementasi kebijakan yang menjadi salah satu aspek terpentingnya merupakan standar operasional prosedur (SOP), SOP merupakan dasar pelaksanaan, jika tidak sesuai SOP maka akan menciptakan ketidakfleksibelan dalam proses implementasi, karena pada pelaksanaan Sistem Keuangan Desa di Pemerintah Desa permisan kecamatan jabon sudah efektif dibuktikan dengan penempatan Kaur Keuangan sebagai operator Sistem Keuangan Desa sudah tepat dan Pemerintah Desa Permisan tidak ketinggalan dalam pengelolaan keuangan Desa meskipun mengalami beberapa kendala dapat dikatakan sudah sesuai SOP dalam penerapannya.

Kesimpulan

Pertama Komunikasi pada pelaksanaan penerapan Sistem Keuangan Desa yang menjadi tolak ukur keberhasilan, komunikasi antara penyelenggara Bimtek dan Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam kejelasan informasi yang dibuktikan dengan adanya arahan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mendistribusikan informasi tentang bagaimana Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) beroperasi belum maksimal atau penjelasan sangat kurang terkait aplikasi tersebut. Namun, komunikasi Pemerintah Desa dan BPD serta Lembaga-Lembaga dan para pemangku kepentingan yang ada di Desa Permisan dalam proses perencanaan APBDes berjalan dengan baik terbukti adanya pembahasan atau musyawarah sebelum penetapan APBdes.

Kedua Sumber daya, pada Pemerintah Desa Permisan dari segi sumber daya manusia terbukti masih kurangnya ketelitian dalam pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), namun pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, ditandai dengan Operator aplikasi dapat menyesuaikan dengan mempelajari secara optimal dalam pengeoperasian Sistem Keuangan Desa, pada sumber daya keuangan di implementasi Sistem Keuangan Desa operator memang tidak dianggarkan sebagai operator aplikasi, dan sumber daya infrastruktur masih kurang baik seperti sarana dan prasarana seperti jaringan yang masih lamban berkekuatan 50 Mbps yang digunakan seluruh ruangan Pemerintah Desa Permisan.

Ketiga, Disposisi seperti Antusiasme aparatur untuk mengikuti pelatihan dan aplikasi studi hingga kompeten, terbukti dengan implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), mencerminkan semangat Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) secara optimal. Kepala Desa selalu memberikan bimbingan dan dorongan kepada jajarannya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dan selalu tepat waktu. Adanya spanduk-spanduk sederhana tentang penggunaan uang untuk prakarsa pembangunan, menunjukkan adanya transparansi pengelolaan keuangan desa yang baik di masyarakat.

Keempat Struktur birokrasi Pemerintah Desa Permisan cukup baik ditandai dengan adanya dengan adanya pembagian kerja antara aparatur desa dan kesesuaiannya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, meskipun memiliki beberapa kendala berupa jaringan yang kuat dan beberapa kali aplikasi error, untuk Kaur Keuangan tidak ketinggalan karena telah menerapkan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Referensi

- Abdullah, M. H., & Samad, A. (2019). PENGARUH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). *IJIS - Indonesian Journal On Information System*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.36549/ijis.v4i1.50>
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54.
- Denzin, L. (2017). BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Desain Penelitian Desain penelitian ini adalah. 27–34.
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Faizin, M. (2022, Agustus 16). *Penerapan e-Government dalam Bidang Pemerintahan di Era Digital*. Retrieved from digitalbisa.id:
- Irwandi, I., Arfa, N., Suhermi, S., Yarni, M., & Bafadhal, F. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 183–192.
- Juardi M, Muchlis M, & Putri R. (2018). EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES DALAMUPAYA PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITASKEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IV(1), 84–107.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 51(1), 51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Kedungjaya, D., Bekasi, K., Rizal Machfuz, H., Priyanti, E., Ilmu, M., Universitas, P., & Karawang, S. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Apbdes Di. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(11), 93–100.
- Lukito, C., Studi, P., Administrasi, I., & Bojonegoro, U. (n.d.). *Di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten*.

- Moleong, L. J. (2006). “ Metodologi Penelitian Kualitatif”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578–583.
- Muniruddin, S. (2021). ... Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(4), 568–578.
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/20196>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014(Bender, 2016)(Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014)
- Ramadhan, K. R., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 10483–10495.
- Riani, F., Kalalinggi, R., & Anggraeiny, R. (2019). Implementasi Aplikasi Siskeudes di Pemerintahan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 7(4), 448–457
- Rivan, A., & Maksum I. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Public Administration Journal*, 9(2), 92–100.
<http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Sululing, S. (2018). Sosialisasi Model Pengelolaan Keuangan Desa. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 1(1), 31–38.
- Suyono, D., & Prakoso, F. E. A. (2018). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1214>
- 12. S, T. I. (2020, November 18). Manfaatkan TI, Kabupaten Sidoarjo Menuju Kota Cerdas Investasi. Retrieved from itworks.id
- Wahyuni & Rosdianti Razak, A. P. (2021). <https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kimap/Index>. *Unismuh*, 2

